

KONTRIBUSI TINGKAT KEMISKINAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN PURBALINGGA

Aji Priambodo

Universitas Perwira Purbalingga

Email koresponden: ajipriambodo@unperba.ac.id

ABSTRAK

Pada tahun 2020, Kabupaten Purbalingga mempunyai tingkat kemiskinan ke-5 terbesar di Provinsi Jawa Tengah dengan tingkat kemiskinan mencapai 15,90%. Sampai saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga berupaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan dalam tahun terakhir walaupun sempat mengalami kenaikan tingkat kemiskinan karena Covid-19. Adanya tingkat kemiskinan ini diduga berdampak pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat kemiskinan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini menggunakan objek penelitian di Kabupaten Purbalingga, dan merupakan penelitian jenis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam jumlah ini jumlah sampel yang digunakan adalah time series dengan rentang kurun waktu 2011-2020. Metode analisis ekonometrika yang digunakan adalah regresi liner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan berdampak sekitar 43,69 % terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purbalingga.

Kata kunci: kemiskinan, pendapatan asli daerah

PENDAHULUAN

Salah satu dari sekian masalah sosial ekonomi adalah kemiskinan, yang masih merupakan masalah serius yang dialami terutama di Indonesia. Meski pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu berusaha untuk mengurangi tingkat kemiskinan, namun pada kenyataannya, sampai saat ini Indonesia masih belum bisa melepaskan belenggu dari masalah kemiskinan. Oleh karena itu, kemiskinan dipandang sesuatu yang harus ditekan, mengingat dampaknya pada pembangunan ekonomi.

Kemiskinan pada dasarnya adalah ketidakmampuan dalam memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Di Indonesia, salah satu landasan yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang termasuk kategori miskin atau tidak adalah dengan mengacu pada

kriteria yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan adanya pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, pengertian penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Perhitungan dalam BPS menunjukkan bahwa Garis Kemiskinan adalah jumlah dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan tersebut, dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Dalam menghitungnya, paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi yang meliputi padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain sebagainya. Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Pada tahun 2020, Kabupaten Purbalingga mempunyai tingkat kemiskinan ke-5 terbesar di Provinsi Jawa Tengah. Sampai saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga berupaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan dalam 10 tahun terakhir walaupun sempat mengalami kenaikan tingkat kemiskinan karena Covid-19. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan di Kabupaten Purbalingga adalah 15,90% mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 15,03%, walaupun pada kurun waktu 10 tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Kabupaten Purbalingga mengalami tren penurunan. Kenaikan tingkat kemiskinan ini juga berpengaruh terhadap kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purbalingga. Dalam kurun waktu 2011-2020, tren PAD cenderung mengalami kenaikan, namun adanya Covid-19 ini juga berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 202 triliun, dibandingkan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 306 triliun.

STUDI LITERATUR

Menurut Amarta Sen (1987) dalam Houghton dan Shahidur (2012) kemiskinan dapat dikaitkan dengan kemampuan untuk

menjalankan suatu fungsi dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, kemiskinan timbul apabila masyarakat tidak memiliki pendapatan, dan tidak mendapatkan pendidikan yang memadai, serta kondisi kesehatan yang buruk, sehingga kemiskinan dapat dianggap sebagai sebuah fenomena multidimensional. Menurut Suparlan (2004) kemiskinan dapat sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang rendah ini, dan secara langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Menurut Ritonga (2003) memberikan definisi bahwa kemiskinan adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya. Kebutuhan dasar minimal yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan kebutuhan sosial yang diperlukan oleh penduduk atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Menurut Nurwati (2008) kemiskinan dapat dilihat sebagai masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial, budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan memiliki arti yang lebih luas dari sekedar lebih rendahnya tingkat pendapatan atau konsumsi seseorang dari standar kesejahteraan terukur seperti kebutuhan kalori minimum atau garis kemiskinan, akan tetapi kemiskinan memiliki arti yang lebih dalam karena berkaitan dengan ketidakmampuan

untuk mencapai aspek di luar pendapatan (non-income factors) seperti akses kebutuhan minimum; kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi.

Menurut BAPPENAS (2005), dalam konteks strategi penanggulangan kemiskinan ini, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Peraturan tentang Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada Undang-undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dalam pembentuk Pendapatan Daerah, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Undang-undang No 33 tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Sedangkan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan

selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Menurut Halim (2004) mendefenisikan tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seberapa besar Pendapatan Asli Daerah akan menunjukkan seberapa besarnya pendapatan suatu kota/kabupaten. Menurut Isdijoso (2002) menyatakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisis hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diusahakan atau dicari setiap Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang penggalan sumber-sumber keuangan tersebut.

Menurut Mardiasmo (2002), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Saleh (2002), Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah saat ini. Salah satu komponen yang sangat diperhatikan dalam menentukan tingkat kemandirian daerah dalam rangka otonomi daerah adalah sektor Pendapatan Asli Daerah. Menurut Mangkosubroto (1997) menyatakan bahwa pada umumnya

penerimaan pemerintah diperlukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pada umumnya penerimaan pemerintah dapat dibedakan antara penerimaan pajak dan bukan pajak, misalnya adalah penerimaan pemerintah yang berasal dari pinjaman pemerintah, baik pinjaman yang berasal dari dalam negeri maupun pinjaman pemerintah yang berasal dari luar negeri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan objek penelitian di Kabupaten Purbalingga, dan merupakan penelitian jenis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam jumlah ini jumlah sampel yang digunakan adalah time series dengan rentang kurun waktu 2011-2020. Metode analisis ekonometrika yang digunakan adalah regresi liner.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berikut ini penulis deskripsikan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Purbalingga tahun 2011-2020

Tahun	Tingkat Kemiskinan (%)	+/-
2011	23,06	-
2012	21,19	-1,87
2013	20,53	-0,66
2014	19,75	-0,78
2015	19,70	-0,05
2016	18,98	-0,72
2017	18,80	-0,18
2018	15,62	-3,18
2019	15,03	-0,59
2020	15,90	0,87

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di

Kabupaten Purbalingga relatif menurun. Penurunan kemiskinan paling tinggi yaitu sebesar -0,78% yaitu pada tahun 2014 dengan tingkat kemiskinan sebesar 19,75%. Namun angka kenaikan tingkat kemiskinan tertinggi dimana adanya dampak Covid-19 dengan mengalami kenaikan 0,87% dengan tingkat kemiskinan 15,90% pada tahun 2020.

Sedangkan pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Purbalingga tahun 2011-2020 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tahun	PAD (triliun)	+/-
2011	94,94	-
2012	112,79	17,85
2013	122,86	10,07
2014	202,59	79,73
2015	215,62	13,03
2016	251,82	36,20
2017	355,86	104,04
2018	282,68	-73,18
2019	306,00	23,32
2020	202,00	-104,00

Sumber: BPS Purbalingga

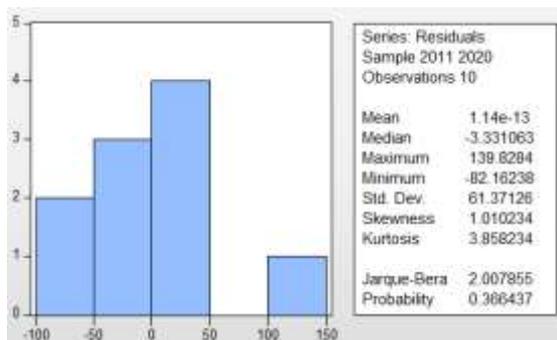
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif mengalami kenaikan. Dalam kurun waktu 2011-2020, kenaikan paling tinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar Rp.104,04 triliun dengan total nilai PAD sebesar Rp 355,86 triliun. Namun angka penurunan tertinggi terjadi dimana adanya dampak Covid-19 menyebabkan penurunan Rp104 triliun dengan jumlah PAD hanya Rp 202 triliun pada tahun 2020.

Hasil analisis antara kontribusi tingkat kemiskinan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Purbalingga dapat diperoleh dari analisis regresi liner.

Sebelum memulai analisis data, terlebih dahulu melakukan Uji Asumsi Klasik. Uji Asumsi Klasik menurut Gujarati (2003) bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian adalah valid dengan data yang digunakan secara teori adalah tidak bias, konsisten dan penaksiran koefisienan regresinya efisien. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang dilakukan adalah pengujian normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, linearitas, dan multikolinearitas.

UJI NORMALITAS

Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak.



Dalam analisis data ini, nilai probability sebesar 0,366437 lebih besar dari tingkat $\alpha=0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal

UJI HETEROSKEDASTISITAS

Uji Heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear.

Statistic	Value	Prob. F	df	Probability
F-statistic	0.009613	Prob. F(1,8)	0.9243	
Obs*R-squared	0.012001	Prob. Chi-Square(1)	0.9128	
Scaled explained SS	0.012560	Prob. Chi-Square(1)	0.9108	

Dalam analisis data ini, nilai *Prob. Chi Square* 0,9128 lebih besar dari $\alpha=0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas (homoskedastisitas)

UJI AUTOKORELASI

Uji Autokorelasi adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu.

Statistic	Value	Prob. F	df	Probability
F-statistic	0.398031	Prob. F(2,6)	0.6881	
Obs*R-squared	1.171357	Prob. Chi-Square(2)	0.5567	

Dalam analisis data ini, nilai *Prob. Chi Square* 0,5567 lebih besar dari $\alpha=0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami gejala autokorelasi

UJI LINEARITAS

Uji linearitas adalah salah satu uji asumsi klasik yang dilakukan untuk mengetahui sifat linear pada sebaran data antara variabel independen dan variabel dependen.

Statistic	Value	df	Probability
t-statistic	1.277602	7	0.2421
F-statistic	1.632266	(1, 7)	0.2421
Likelihood ratio	2.095968	1	0.1477

Dalam analisis data ini, nilai probability F-statistic sebesar 0,2421 lebih besar dari nilai $\alpha=0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data variabel bebas linear dengan variabel terikat.

UJI MULTIKOLINEARITAS

Uji multikolinearitas adalah uji yang dilakukan untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi ada interkorelasi atau kolinearitas antar variabel bebas.

Variance Inflation Factors			
Date: 09/09/21 Time: 18:18			
Sample: 2011 2020			
Included observations: 10			
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	24999.72	59.00006	NA
TINGKAT_KEMISKI...	69.12131	59.00006	1.000000

Dalam analisis data ini, nilai Variance Inflation Factors (VIF) kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi multikolinearitas.

Selanjutnya melakukan analisis data dengan metode Ordinary Least Square (OLS) untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel terikat. Analisis yang dilakukan adalah regresi liner sederhana.

Dependent Variable: PAD				
Method: Least Squares				
Date: 09/09/21 Time: 17:05				
Sample: 2011 2020				
Included observations: 10				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	657.7068	158.1130	4.159727	0.0032
TINGKAT_KEMISKINAN	-23.49336	8.313923	-2.825786	0.0223
R-squared	0.499533	Mean dependent var	214.7160	
Adjusted R-squared	0.436974	S.D. dependent var	86.75155	
S.E. of regression	65.09406	Akaike info criterion	11.36840	
Sum squared resid	33897.89	Schwarz criterion	11.42892	
Log likelihood	-54.83200	Hannan-Quinn criter.	11.30001	
F-statistic	7.985064	Durbin-Watson stat	1.295012	
Prob(F-statistic)	0.022294			

Dari hasil analisis diatas terdapat nilai *Adjusted R-squared* adalah 0,436974 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 43,7% sisanya sebesar 56,3% dipengaruhi oleh faktor lain. Sehingga dapat merumuskan persamaan regresi :

$$Y = 657,7068 - 23,49336X$$

Sehingga dapat disimpulkan bahwa

- Nilai *Coefficient* 657,71 menunjukkan bahwa jika variabel tingkat kemiskinan konstan, maka rata-rata variabel PAD adalah sebesar 651,71
- Nilai *Coefficient* -23,49 menunjukan bahwa jika variabel tingkat kemiskinan meningkat sebesar 1 satuan, maka akan

menurunkan variabel PAD sebesar - 23,49.

Dari hasil analisis tersebut juga menunjukkan tingkat probabilitas variabel Tingkat Kemiskinan sebesar 0,0223 atau lebih kecil dari signifikansi 0,05 yang artinya tingkat kemiskinan mempunyai pengaruh yang signifikan negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Purbalingga berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purbalingga.

Hal ini sesuai dengan penelitian Arini dan Mustika (2015) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Demikian juga hasil penelitian Paat et al (2017) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan secara statistik. Hal yang kemungkinan dapat dijelaskan adalah tingginya tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap faktor-faktor pembentuk Pendapatan Asli Daerah itu sendiri, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain yang sah. Dengan tingginya tingkat kemiskinan dapat mempengaruhi keadaan ekonomi sehingga dapat menurunkan Pendapatan Asli Daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, maka kesimpulan yang diperoleh adalah: Pada kurun waktu 2011-2020, ada korelasi antara variabel tingkat kemiskinan di Kabupaten Purbalingga terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purbalingga sebesar sebesar 43,7%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Purbalingga berpengaruh negatif terhadap

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purbalingga.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul *Halim*. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Arini & Mustika, M. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali Tahun 2007-2013. E-Jurnal EP Unud.

Badan Pusat Statistik, 2021. Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2021. Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga.

Bappenas, 2004. Rencana Strategis Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, Jakarta.

Gujarati, Damodar, 2003, Ekonometri Dasar. Terjemahan: Sumarno Zain, Jakarta: Erlangga.

Haughton, Jonathan dan Shahidur R. Khandker, 2012, Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan (Handbook on Poverty and Inequality), Jakarta: Salemba Empat

Isdijoso, Brahmantio, 2002. Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus : Sektor Pendidikan di kota Surakarta), Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 6 No.1.

Mangkoesebroto, G.. 1997. Ekonomi Publik. Yogyakarta : BPF

Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Nurwati, N. 2008. Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan. Jurnal Kependudukan Padjadjaran, Vol.10 No 1.

Paat, D.C., Koleangan R., Rimate, V. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Dampaknya terhadap Kemiskinan di Kota Bitung. Jurna Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol 18. No. 4

Ritonga, Hamonangan. 2003. Perhitungan Penduduk Miskin. Jakarta: Badan pusat Statistik.

Saleh, S. 2002. Faktor-faktor penentu tingkat kemiskinan regional di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Ekonomi Negara Berkembang. Hal 87-102.

Suparlan, Parsudi. 2004. Kemiskinan di Perkotaan. Jakarta: Yayasan Obor.